ANALISIS SKEMA PEMBIAYAAN *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)* TRANSMETRO PEKANBARU

Daffa Ridho Anhaly
NPP. 33.0171

Program Studi Keuangan Publik
Email: daffa.anhaly@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ira Meiyenti, S.IP., M.Si
Email: irameiyenti@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (Gap): The limited fiscal capacity of the Pekanbaru City Government in financing the operations of Trans Metro Pekanbaru (TMP), the high dependence on regional budget subsidies (APBD), the low level of passenger occupancy, and the lack of studies examining the implementation of the *Public Private Partnership* (PPP) scheme in regional public transportation constitute the background of this research. At the same time, government-private sector partnerships are considered an alternative financing mechanism capable of improving the efficiency and sustainability of urban transportation services. ***Purpose:*** This study aims to analyze the *Public Private Partnership* (PPP) financing scheme implemented in Trans Metro Pekanbaru (TMP). ***Method:*** This research employed a descriptive qualitative approach using (Rebecca, 2011) *Public Private Partnership* framework, which consists of three dimensions: *input*, *output*, and *outcome*. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and document analysis involving representatives of the Pekanbaru City Government, the Department of Transportation, the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), and private sector partners participating in the TMP partnership scheme. ***Results/ Findings:*** The findings reveal that, in the input dimension, the PPP scheme involves the Pekanbaru City Government, the Department of Transportation, Bank Syariah Indonesia (BSI), Viera, and the United Kingdom's Future Cities Infrastructure Program (FCIP) in financing and modernizing TMP services. In the output dimension, the implementation of digital payment systems, integrated standard operating procedures, and real-time data reporting mechanisms has enhanced transparency and reduced the risk of revenue leakage. In the outcome dimension, the government has successfully transformed its role from operator to regulator, resulting in improved budget efficiency, optimization of public assets, and greater sustainability of public transportation services. However, several challenges remain, including the bureaucratic–private sector speed gap, the complexity of auditing transaction data, and the need for stronger legal and supervisory frameworks. **Conclusion:** This study concludes that the *Public Private Partnership* financing scheme in Trans Metro Pekanbaru has been implemented effectively in supporting financing efficiency, service modernization, and the strengthening of public transportation governance through collaboration between the government and private sector.

Keywords: Budget Efficiency; Public Private Partnership; Public Transportation; Trans Metro Pekanbaru.

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru dalam membiayai operasional Trans Metro Pekanbaru (TMP), tingginya ketergantungan terhadap subsidi APBD, rendahnya tingkat keterisian penumpang, serta minimnya kajian mengenai implementasi skema *Public Private Partnership* (PPP) pada transportasi publik daerah menjadi latar belakang penelitian ini. Di sisi lain, kemitraan pemerintah dan swasta dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan transportasi perkotaan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema pembiayaan *Public Private Partnership* (PPP) pada Trans Metro Pekanbaru (TMP). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan teori *Public Private Partnership* dari (Rebecca, 2011) yang terdiri atas dimensi *input*, *output*, dan *outcome*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi dokumen dengan informan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan, BPKAD, serta mitra swasta yang terlibat dalam pengelolaan TMP. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi **input**, skema PPP melibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan, BSI, Viera, dan Future Cities Infrastructure Program (FCIP) Inggris dalam pembiayaan dan modernisasi layanan TMP. Pada dimensi **output**, penerapan sistem pembayaran digital, SOP terintegrasi, dan mekanisme pelaporan data real-time berhasil meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Pada dimensi **outcome**, pemerintah berhasil bertransformasi dari operator menjadi regulator, sehingga meningkatkan efisiensi anggaran, optimalisasi aset daerah, dan keberlanjutan layanan transportasi. Adapun hambatan yang ditemukan meliputi kesenjangan kecepatan kerja (*speed gap*) antara birokrasi dan swasta, kompleksitas audit data transaksi, serta kebutuhan penguatan kerangka hukum dan pengawasan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema pembiayaan *Public Private Partnership* pada Trans Metro Pekanbaru telah berjalan cukup efektif dalam mendukung efisiensi pembiayaan, modernisasi layanan, dan penguatan tata kelola transportasi publik melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta.

Kata kunci: Efisiensi Anggaran; Public Private Partnership; Trans Metro Pekanbaru; Transportasi Publik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi publik merupakan salah satu layanan dasar yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Sistem transportasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan orang dan barang, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas, efisiensi aktivitas perkotaan, serta kualitas hidup masyarakat (Miro, 2005). Sejalan dengan itu, transportasi berkelanjutan menjadi kebutuhan penting bagi kota-kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat (Susantono & Parikesit, 2004).

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau mengalami perkembangan penduduk yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2025*, peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap layanan transportasi publik yang efektif dan efisien. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh berbagai permasalahan transportasi, seperti kemacetan lalu lintas dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mencatat terdapat beberapa titik kemacetan utama di wilayah Kota Pekanbaru yang memerlukan penanganan melalui penguatan sistem transportasi umum.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru mengembangkan layanan Trans Metro Pekanbaru (TMP) sebagai moda transportasi massal perkotaan. Kehadiran TMP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Akan tetapi, pengelolaan transportasi publik membutuhkan biaya operasional yang besar dan berkelanjutan, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam membiayai seluruh kebutuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembiayaan yang dapat menjamin keberlanjutan layanan transportasi publik.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur publik adalah *Public Private Partnership* (PPP). PPP merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik melalui pembagian sumber daya, risiko, serta tanggung jawab di antara para pihak yang terlibat. Kerja sama ini juga memungkinkan pemerintah memperoleh akses terhadap modal, teknologi, dan kemampuan manajerial sektor swasta yang tidak selalu dimiliki oleh organisasi publik. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, PPP dinilai mampu menjadi solusi atas keterbatasan pembiayaan pemerintah sekaligus mempercepat penyediaan layanan kepada masyarakat (Utama, 2010).

Pentingnya penerapan PPP juga didukung oleh kebijakan nasional yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Kerja sama pemerintah dan swasta diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara efisien dan efektif. Meskipun demikian, implementasi PPP pada sektor transportasi publik daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi, pembagian risiko, koordinasi antaraktor, hingga pengawasan pelaksanaan kerja sama. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penerapan PPP pada pembangunan infrastruktur secara umum, sementara kajian yang secara khusus mengkaji skema pembiayaan PPP pada transportasi publik perkotaan masih relatif terbatas (Gasali & Surya, 2016). Di sisi lain, penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan transportasi publik berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola dan model pembiayaan yang diterapkan(Prakasa et al., 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai skema pembiayaan *Public Private Partnership* pada Trans Metro Pekanbaru. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dijalankan dalam pembiayaan layanan transportasi publik serta sejauh mana skema tersebut mampu mendukung keberlanjutan dan efektivitas pelayanan Trans Metro Pekanbaru.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan pembiayaan operasional Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya kebutuhan biaya operasional, keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru, serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik yang berkelanjutan. Di sisi lain, transportasi publik merupakan layanan dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, dan mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menerapkan skema *Public Private Partnership* (PPP) sebagai alternatif pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan operasional Trans Metro Pekanbaru.

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi skema pembiayaan *Public Private Partnership* pada Trans Metro Pekanbaru. Pertama, masih tingginya ketergantungan operasional transportasi publik terhadap dukungan anggaran pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas layanan, memperluas cakupan pelayanan, serta melakukan pengembangan sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Pekanbaru.

Kedua, masih terdapat permasalahan efektivitas pengelolaan transportasi publik (Hafis & Hakim, 2014) menunjukkan bahwa pengelolaan transportasi publik perkotaan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar pelayanan dapat berjalan secara optimal. Selain itu, hasil penelitian (Prakasa et al., 2024) menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dan kualitas layanan Trans Metro Pekanbaru masih menjadi faktor penting dalam mewujudkan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak hanya bergantung pada aspek pelayanan, tetapi juga pada keberlanjutan model pembiayaan yang digunakan.

Ketiga, pelaksanaan kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik sering menghadapi tantangan berupa perbedaan kepentingan antaraktor, mekanisme pembagian risiko, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta pengawasan pelaksanaan kerja sama. Meskipun PPP dipandang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik (Gasali & Surya, 2016), implementasinya tetap memerlukan tata kelola yang baik agar tujuan kemitraan dapat tercapai secara efektif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas Public Private Partnership sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana skema pembiayaan PPP diterapkan dalam operasional transportasi publik daerah, khususnya pada Trans Metro Pekanbaru. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pembangunan infrastruktur umum, pengelolaan aset daerah, atau evaluasi kualitas pelayanan transportasi, sehingga belum banyak menjelaskan dinamika kemitraan, mekanisme pembiayaan, serta hasil yang diperoleh dari penerapan PPP dalam pengelolaan transportasi publik perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis skema pembiayaan *Public Private Partnership* pada Trans Metro Pekanbaru.

1.3. Urgensi

Penelitian ini penting dilakukan karena Trans Metro Pekanbaru merupakan layanan transportasi publik yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, skema *Public Private Partnership* (PPP) menjadi alternatif pembiayaan yang perlu dikaji untuk mengetahui efektivitasnya dalam mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik. Dari aspek keilmuan, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai implementasi PPP pada sektor transportasi publik daerah yang masih relatif terbatas. Dari aspek praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru serta para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas kerja sama pemerintah dan swasta pada pengelolaan Trans Metro Pekanbaru. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah akan memiliki keterbatasan informasi empiris mengenai efektivitas skema pembiayaan PPP sehingga proses evaluasi dan pengambilan kebijakan terkait pengembangan transportasi publik berpotensi kurang optimal dan tidak berbasis bukti yang memadai.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas *Public Private Partnership* (PPP), pembiayaan infrastruktur, dan transportasi publik. Penelitian (Ramadhani et al., 2025) mengkaji *Public Private Partnership* sebagai solusi pembangunan infrastruktur melalui studi literatur pada proyek Bandara Kediri dengan fokus pada implementasi PPP dalam pembangunan infrastruktur. (Widianto, 2017) meneliti hambatan *Public Private Partnership* antara Pemerintah Kota Surabaya dan pihak swasta dalam pengelolaan aset daerah menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kendala kerja sama pemerintah dan swasta.

Selanjutnya, (Rahmawati et al., 2025) membahas efektivitas skema *Public Private Partnership* dalam infrastruktur transportasi perkotaan melalui studi perbandingan MRT Jakarta dan Bangkok

Skytrain dengan fokus pada efektivitas model kemitraan dalam mendukung transportasi massal perkotaan. (Gasali & Surya, 2016) mengkaji *Public Private Partnership* sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur selain APBN/APBD dengan menitikberatkan pada peran PPP sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Dalam konteks transportasi publik, (Hafis & Hakim, 2014) meneliti sumber daya pengelola transportasi publik perkotaan pada Bus Trans Metro Pekanbaru dengan fokus pada aspek pengelolaan dan sumber daya organisasi. Sementara itu, (Prakasa et al., 2024) mengevaluasi kinerja dan kualitas pelayanan Bus Trans Metro Pekanbaru dalam mendukung mobilitas berkelanjutan dengan fokus pada aspek pelayanan transportasi publik.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai *Public Private Partnership* lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset daerah, dan efektivitas kemitraan pemerintah-swasta, sedangkan penelitian mengenai Trans Metro Pekanbaru cenderung membahas aspek kinerja dan pelayanan transportasi. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang mengkaji secara khusus skema pembiayaan *Public Private Partnership* pada Trans Metro Pekanbaru, sehingga penelitian ini berupaya melengkapi dan memperkaya kajian mengenai implementasi PPP dalam pembiayaan transportasi publik daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan secara spesifik oleh penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian ini terletak pada konteks objek penelitian, yaitu skema pembiayaan *Public Private Partnership* (PPP) pada Trans Metro Pekanbaru sebagai layanan transportasi publik daerah. Penelitian terdahulu umumnya membahas PPP dalam pembangunan infrastruktur secara umum, pengelolaan aset daerah, maupun efektivitas kemitraan pada proyek infrastruktur tertentu seperti bandara, MRT, dan aset publik, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan PPP dalam pembiayaan operasional dan pengelolaan transportasi publik daerah.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari aspek fokus kajian. Penelitian (Hafis & Hakim, 2014) serta (Prakasa et al., 2024) lebih menitikberatkan pada pengelolaan, kinerja, dan kualitas pelayanan Trans Metro Pekanbaru, sementara penelitian ini berfokus pada mekanisme pembiayaan, peran para aktor yang terlibat, serta hasil yang diperoleh dari penerapan skema *Public Private Partnership* dalam mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik.

Kebaruan penelitian ini juga terlihat dari penggunaan teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori *Public Private Partnership* dari (Rebecca, 2011) yang menganalisis kemitraan melalui dimensi *input, output,* dan *outcome*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara komprehensif proses kemitraan, hasil yang dihasilkan, serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan PPP pada Trans Metro Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian administrasi publik dan tata kelola kemitraan pemerintah-swasta, khususnya pada sektor transportasi publik daerah.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai skema pembiayaan *Public Private Partnership* (PPP) pada Trans Metro Pekanbaru (TMP).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori (Nurdin & Hartati, 2019). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam bagaimana skema pembiayaan *Public Private Partnership* (PPP) diterapkan pada Trans Metro Pekanbaru serta menggambarkan proses kemitraan yang terjadi antara

pemerintah dan pihak swasta. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan proses, interaksi antaraktor, serta implementasi kebijakan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teori *Public Private Partnership* dari (Rebecca, 2011) yang terdiri atas dimensi *input*, *output*, dan *outcome* sebagai alat analisis dalam memahami pelaksanaan skema pembiayaan PPP pada Trans Metro Pekanbaru.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kerja sama pembiayaan Trans Metro Pekanbaru. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami objek penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan mendalam (Tungka & Ridwan, 2024). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru karena memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan kerja sama pengelolaan Trans Metro Pekanbaru. Informan lainnya terdiri dari pejabat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), pihak Viera, serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan skema *Public Private Partnership* pada Trans Metro Pekanbaru. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari sisi pemerintah maupun mitra swasta.

Pengujian keabsahan data diperlukan untuk memastikan data penelitian memiliki tingkat konsistensi, objektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rahma et al., 2022). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sehingga menghasilkan temuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, khususnya pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan instansi yang terlibat dalam skema pembiayaan *Public Private Partnership* Trans Metro Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2025 yang mencakup tahap pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Input

Dimensi input menurut (Rebecca, 2011) merupakan seluruh unsur yang menjadi dasar terbentuknya suatu kerja sama *Public Private Partnership* (PPP), meliputi *focus and scope*, *attributes/structural*, *actors*, *governance and decision making*, serta *institutional design and institutionalisation*. Pada dimensi ini, analisis difokuskan pada sumber daya, aktor, struktur kelembagaan, serta mekanisme yang mendukung pelaksanaan skema pembiayaan PPP pada Trans Metro Pekanbaru (TMP).

Berdasarkan hasil penelitian, fokus dan cakupan (focus and scope) dari skema PPP pada Trans Metro Pekanbaru diarahkan pada penguatan pembiayaan dan modernisasi layanan transportasi publik melalui keterlibatan sektor swasta. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi, khususnya halte dan sistem layanan TMP, tanpa membebani APBD secara berlebihan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Viera, serta *Future Cities Infrastructure Program* (FCIP) dari Inggris. Keterlibatan para mitra tersebut tidak hanya mencakup renovasi halte, tetapi juga pengembangan sistem pembayaran digital, pengadaan armada bus listrik, dan peningkatan fasilitas pendukung transportasi publik.

Pada aspek attributes/structural, kerja sama PPP pada TMP menunjukkan adanya kapasitas kelembagaan yang semakin berkembang. Kerja sama dengan BSI telah dimulai melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS dan BSI Mobile pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun

2025 dilakukan renovasi halte melalui skema CSR sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki fasilitas publik tanpa meningkatkan beban anggaran daerah. Keberlanjutan kerja sama ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan sektor swasta tidak bersifat sementara, melainkan berkembang menjadi kemitraan yang mendukung modernisasi layanan transportasi perkotaan. Selanjutnya, dari aspek actors, penelitian menemukan bahwa skema PPP pada Trans Metro Pekanbaru melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertindak sebagai regulator dan koordinator utama kebijakan transportasi. BSI berperan dalam penyediaan sistem pembayaran digital dan dukungan renovasi halte. Viera berkontribusi dalam pembangunan dan peremajaan fasilitas halte, sedangkan FCIP memberikan bantuan teknis berupa penyusunan *Detailed Engineering Design* (DED), studi inklusivitas, dan pengembangan sistem *Bus Rapid Transit* berbasis teknologi. Pembagian peran tersebut mencerminkan adanya kolaborasi multisektor yang menjadi karakteristik utama skema PPP.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh peneliti, struktur pembiayaan TMP juga menunjukkan penerapan model blended financing atau pembiayaan campuran. Investasi modal (*capital expenditure*) sebesar Rp1,65 miliar berasal dari CSR dan mitra swasta untuk renovasi halte dan sistem QRIS. Bantuan teknis FCIP mencapai Rp5,2 miliar untuk pengembangan sistem transportasi dan perencanaan bus listrik. Sementara itu, biaya operasional (*operational expenditure*) tetap didukung APBD melalui skema *Buy The Service* (BTS), dan pembiayaan armada bus listrik direncanakan melalui konsorsium perbankan dengan nilai sekitar Rp18,4 miliar. Total valuasi ekosistem pembiayaan mencapai sekitar Rp33,05 miliar. Struktur pembiayaan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pendanaan, melainkan berbagi peran dengan sektor swasta dan mitra internasional. Dalam praktiknya, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memegang peran utama sebagai regulator yang mengatur arah kebijakan, mengawasi pelaksanaan kerja sama, dan memastikan seluruh pihak menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Kejelasan pembagian peran tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga keberlangsungan kemitraan dan meminimalkan potensi konflik antaraktor.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi input pada skema pembiayaan *Public Private Partnership* Trans Metro Pekanbaru telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya fokus kerja sama yang jelas, keterlibatan aktor yang beragam, dukungan regulasi yang memadai, serta struktur pembiayaan yang mengombinasikan sumber dana pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional. Kondisi tersebut menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan kemitraan dalam mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik di Kota Pekanbaru.

3.2 Output

Dimensi output menurut (Rebecca, 2011)merujuk pada hasil langsung yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama Public Private Partnership (PPP). Output menunjukkan capaian nyata yang dihasilkan dari proses kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, baik dalam bentuk peningkatan fasilitas, inovasi layanan, penguatan sistem operasional, maupun perubahan tata kelola yang dapat dirasakan dalam jangka pendek hingga menengah. Dalam penelitian ini, analisis output difokuskan pada hasil yang diperoleh dari implementasi skema pembiayaan PPP pada Trans Metro Pekanbaru (TMP).

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu output utama dari penerapan PPP pada TMP adalah modernisasi sistem pembayaran transportasi publik melalui digitalisasi transaksi. Kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menghasilkan penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS dan aplikasi BSI Mobile. Inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendukung transparansi pengelolaan pendapatan transportasi publik. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran

digital juga mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai yang berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan.

Output berikutnya adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi publik. Melalui dukungan pembiayaan dan program CSR dari mitra swasta, sejumlah halte Trans Metro Pekanbaru mengalami renovasi dan peremajaan fasilitas. Perbaikan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas pengguna transportasi publik. Kehadiran halte yang lebih representatif menjadi salah satu hasil nyata dari kerja sama pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain itu, kerja sama dengan Future Cities Infrastructure Program (FCIP) menghasilkan output berupa dukungan teknis dan perencanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan yang lebih modern. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan Detailed Engineering Design (DED), kajian transportasi, studi inklusivitas, serta perencanaan implementasi armada bus listrik. Hasil tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengembangan sistem transportasi publik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dari aspek tata kelola, penerapan PPP juga menghasilkan penguatan sistem pengelolaan dan pelaporan data transportasi publik. Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan layanan mendorong peningkatan koordinasi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam operasional Trans Metro Pekanbaru. Sistem pelaporan yang lebih terstruktur memungkinkan pemerintah memperoleh data operasional secara lebih cepat dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan evaluasi layanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi output pada skema pembiayaan Public Private Partnership Trans Metro Pekanbaru telah menghasilkan berbagai capaian yang mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Capaian tersebut terlihat dari digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan fasilitas halte, tersedianya perencanaan teknis pengembangan transportasi modern, serta penguatan tata kelola operasional. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta tidak hanya memberikan dukungan pembiayaan, tetapi juga menghasilkan inovasi dan perbaikan layanan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pengguna Trans Metro Pekanbaru.

3.3 Outcome

Dimensi outcome menurut (Rebecca, 2011) merupakan dampak atau manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan Public Private Partnership (PPP) dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Outcome tidak hanya melihat hasil langsung dari kerja sama, tetapi juga perubahan yang terjadi terhadap efektivitas tata kelola, efisiensi pembiayaan, dan keberlanjutan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, dimensi outcome digunakan untuk menganalisis dampak penerapan skema pembiayaan PPP terhadap pengelolaan dan keberlanjutan Trans Metro Pekanbaru (TMP). Berdasarkan hasil penelitian, salah satu outcome utama dari penerapan PPP pada Trans Metro Pekanbaru adalah meningkatnya efisiensi pembiayaan layanan transportasi publik. Keterlibatan sektor swasta melalui dukungan pembiayaan, program CSR, serta bantuan teknis memungkinkan pemerintah memperoleh tambahan sumber daya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor pembangunan lainnya, sekaligus menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik.

Outcome berikutnya adalah transformasi peran pemerintah dari operator menjadi regulator. Sebelum adanya penguatan skema kemitraan, pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam penyediaan dan pengelolaan layanan transportasi publik. Melalui PPP, pemerintah dapat lebih berfokus pada fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan, sementara sebagian aspek teknis dan dukungan pembiayaan melibatkan pihak swasta. Perubahan peran ini mencerminkan

penerapan prinsip tata kelola kolaboratif yang mendorong efisiensi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan publik.

Selain itu, penerapan PPP memberikan dampak terhadap peningkatan keberlanjutan sistem transportasi publik di Kota Pekanbaru. Dukungan perencanaan pengembangan bus listrik, digitalisasi layanan, dan peningkatan infrastruktur transportasi menunjukkan bahwa kerja sama yang dibangun tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pengembangan sistem transportasi yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, peluang pengembangan layanan transportasi publik di masa depan menjadi lebih terbuka. Dari sisi tata kelola, implementasi PPP juga menghasilkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan layanan transportasi publik. Penerapan sistem pembayaran digital dan mekanisme pelaporan yang lebih terintegrasi memungkinkan pemerintah memperoleh data operasional secara lebih akurat dan real-time. Kondisi tersebut mendukung proses pengawasan, evaluasi, serta pengambilan keputusan yang lebih berbasis data sehingga kualitas tata kelola layanan publik dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi outcome pada skema pembiayaan Public Private Partnership Trans Metro Pekanbaru telah menunjukkan dampak yang positif. Penerapan PPP tidak hanya menghasilkan efisiensi pembiayaan, tetapi juga mendorong transformasi peran pemerintah, meningkatkan keberlanjutan layanan transportasi publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Dengan demikian, skema PPP menjadi instrumen yang mendukung pengembangan transportasi publik yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan skema Public Private Partnership (PPP) pada Trans Metro Pekanbaru mampu menjadi alternatif pembiayaan yang mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Kerja sama tersebut menghasilkan berbagai inovasi, seperti digitalisasi sistem pembayaran, renovasi halte, serta perencanaan pengembangan transportasi yang lebih modern dan berkelanjutan. Sama halnya dengan temuan (Gasali & Surya, 2016) dan (Ramadhani et al., 2025), penelitian ini menunjukkan bahwa PPP dapat menjadi solusi atas keterbatasan anggaran pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa keterlibatan sektor swasta mampu membantu pemerintah menyediakan layanan yang lebih efektif tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan (Rahmawati et al., 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan PPP dipengaruhi oleh kejelasan pembagian peran antaraktor. Pada Trans Metro Pekanbaru, pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan pihak swasta memberikan dukungan pembiayaan, teknologi, dan pengembangan fasilitas. Namun, penelitian ini berbeda (Hafis & Hakim, 2014)yang lebih menitikberatkan pada sumber daya internal organisasi dalam pengelolaan Trans Metro Pekanbaru. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan layanan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas organisasi pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan membangun kemitraan dengan sektor swasta dan pihak eksternal lainnya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi PPP pada Trans Metro Pekanbaru telah memberikan kontribusi positif terhadap pembiayaan, peningkatan kualitas layanan, dan keberlanjutan transportasi publik. Temuan ini sekaligus memperkuat penelitian terdahulu yang menempatkan PPP sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan skema *Public Private Partnership* (PPP) pada Trans Metro Pekanbaru didukung oleh adanya komitmen dan kesamaan tujuan antara pemerintah dan pihak swasta dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, serta dukungan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kerja sama. Keterlibatan berbagai mitra, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Viera, dan *Future Cities Infrastructure Program* (FCIP), turut memperkuat pelaksanaan PPP melalui dukungan pembiayaan, pengembangan fasilitas, dan bantuan teknis. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, antara lain masih adanya tantangan koordinasi dan sinkronisasi antar pihak yang terlibat akibat perbedaan mekanisme kerja dan kepentingan masing-masing aktor. Selain itu, keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung operasional Trans Metro Pekanbaru masih menjadi tantangan sehingga diperlukan penguatan model kemitraan yang lebih berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PPP tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber pembiayaan, tetapi juga oleh komitmen para pihak, dukungan regulasi, serta efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa skema Public Private Partnership (PPP) dalam pembiayaan Trans Metro Pekanbaru telah berjalan dengan baik melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak swasta yang diwujudkan dalam dukungan pembiayaan, pengembangan fasilitas, digitalisasi layanan, serta perencanaan transportasi berkelanjutan. Penerapan skema PPP tersebut mampu mendukung keberlanjutan layanan transportasi publik dan mengurangi ketergantungan pembiayaan pada pemerintah daerah. Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPP, disarankan agar Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat koordinasi dengan para mitra, memperluas kerja sama dengan sektor swasta, serta mengembangkan model pembiayaan yang lebih inovatif untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Trans Metro Pekanbaru secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada skema Public Private Partnership (PPP) dalam pembiayaan Trans Metro Pekanbaru, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh bentuk kerja sama pemerintah dan swasta di sektor transportasi maupun sektor pelayanan publik lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas pada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama, sehingga temuan yang diperoleh sangat bergantung pada data dan informasi yang diberikan oleh informan selama proses penelitian. Penelitian ini juga dilaksanakan dalam rentang waktu yang terbatas sehingga belum mampu mengkaji secara mendalam dampak jangka panjang dari penerapan skema Public Private Partnership (PPP) terhadap keberlanjutan layanan Trans Metro Pekanbaru.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terbatas pada analisis skema *Public Private Partnership* (PPP) dalam pembiayaan Trans Metro Pekanbaru. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi PPP pada sektor transportasi publik di daerah lain atau membandingkan beberapa model kerja sama pemerintah dan swasta untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas skema PPP. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada pengukuran dampak jangka panjang penerapan PPP terhadap kualitas pelayanan,

kepuasan masyarakat, dan keberlanjutan transportasi publik sehingga menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan menyeluruh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan dari pihak pemerintah maupun mitra swasta yang terlibat dalam skema *Public Private Partnership* (PPP) Trans Metro Pekanbaru, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Gasali, M., & Surya, R. Z. (2016). Public Private Partnership Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Selain Apbn/Apbd Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal BAPPEDA*, *2*(3), 178–185. https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/40

Hafis, R. I. Al, & Hakim, A. (2014). Sumber Daya Pengelola Transportasi Publikperkotaan: Studi Bus Trans Metro Pekan Baru. *Jurnal Reformasi*, *4*(1), 28–33. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/47/43

Miro, F. (2005). *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*. Erlangga.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendikia Surabaya.

Prakasa, R. R., Nugroho, S. A., Audah, S., Benny, & Putra, H. R. (2024). Evaluation of Trans Metro Pekanbaru public transport bus performance and services for sustainable mobility. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1416*(1), 1–10. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1416/1/012018

Rahma, M., Ekowati, M., Nallen, E. M., Praja, S. J., Saribulan, N., Wulandari, S., & Rahman, H. (2022). *Metodologi Penelitian Terapan*. CV. Sketsa Media.

Rahmawati, R., Rahman, Y. N., Hidayati, A., Khozinunniam, K., & Atmaja, I. (2025). Studi Komparatif Headway Dan Metode Pembayaran Pada Mrt Jakarta Dan Mrt Bangkok. *Construction and Material Journal*, *7*(1), 1–12. https://doi.org/10.32722/cmj.v7i1.7290

Ramadhani, A., Musleh, M., Tamrin, M. H., & Subianto, A. (2025). Public-Private Partnership Sebagai Solusi Pembangunan Infrastruktur: Studi Literatur Proyek Bandara Kediri. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, *5*(1), 1–14. https://doi.org/10.22225/jcpa.5.1.2025.1-14

Rebecca, H. (2011). *Analysing the Role of Public-Private Partnership in Global Governance: Institutional Dynamics, Variation and Effects*. The London School of Economics and Political Science.

Susantono, B., & Parikesit, D. (2004). *1-2-3 langkah: Langkah kecil yang kita lakukan menuju transportasi yang berkelanjutan*. Majalah Transportasi Indonesia.

Tungka, N. F., & Ridwan. (2024). *METODE PENELITIAN*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.

Utama, D. (2010). Prinsip dan Strategi Penerapan PPP Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi. *Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia*, *12*(3), 145–151. https://www.researchgate.net/publication/338407788_PRINSIP_DAN_STRATEGI_PENERAPAN_PUBLIC_PRIVATE_PARTNERSHIP_DALAM_PENYEDIAAN_INFRASTRUKTUR_TRANSPORTASI

Widianto, Y. (2017). *Hambatan Public Private Partnership Antara Pemerintah Kota Surabaya Dan Pt Star Dalam Pengelolaan Idle Asset Di Taman Remaja Surabaya* [Universitas Airlangga]. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/67792


INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
1956
KEMENTERIAN DALAM NEGERI